BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh warganegaranya harus berdasarkan hukum.¹ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 menganut Negara kesejahteraan (*welfare state*), sesuai dengan ajaran Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeyinis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan

¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

keamanan (*rust en ordef*).

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah "*consideration*".²

Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan" atau "penundaan pembayaran".

Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pengadilan atas

² Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.23.

permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat 5).

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat 6 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut wajib memuat:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan pengadilan dengan suatu keputusan Hakim.
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Selanjutnya diatur bahwa salinan putusan Pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitur, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal Debitur, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator, Kurator

yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitur;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak

diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitur) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).³

Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan.

R. Subekti menyatakan bahwa eksekusi adalah:

"Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi".⁴

Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka "kurator" bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (*boedel*). Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami

³ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 34.

⁴ R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, Bandung: Binacipta, hal. 130.

ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor melalui Kurator.

Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 5 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut

Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi

Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa

tempat usaha debitur.

Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana dan pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh Sdr. AW dan Sdr. ARS selaku Kurator TAS. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / I / 2017 / Jateng / Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2017. Obyek jaminan (budel pailit) telah dijual oleh Kurator dengan harga yang sangat rendah bahkan untuk tanah dan bangunan di Semarang dijual kurang dari setengah harga NJOP PBB.

Dari hasil penjualan jaminan (setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak), Kurator telah menyerahkan pembayaran kepada BCA sebesar Rp. 848.762.753,- sedangkan outstanding hutang Debitur TAS (dalam Pailit) per tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp 4.134.016. 692,54 sehingga mengakibatkan BCA selaku kreditur separatis atau pemegang hak tanggungan telah dirugikan Rp.3.285.253.939,54 (Outstanding pinjaman debitur per tanggal 29 Juli 2015 dikurangi pembayaran hasil penjualan boedel pailit) dengan penjualan agunan secara di bawah tangan yang dilakukan Kurator yang harganya jauh dibawah harga pasar bahkan di bawah harga likuidasi dan nilai NJOP PBB. Seharusnya menurut ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas penjualan jaminan/obyek hak tanggungan secara di bawah tangan dapat

dilakukan dengan kesepakatan BCA selaku pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan harga tertinggi untuk menguntungkan semua pihak. Tetapi ketentuan ini diabaikan oleh Kurator.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Terhadap Kurator Yang Menyalahgunakan Kewenangan Terkait Pengurusan Dan Pemberesan Harta Boedel Pailit”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit bagaimana upaya penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai penegakan hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit dan hambatan atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.
- b Dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan kebijakan penegakan hukum oleh

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.

2. Manfaat Praktis

- a Bagi kreditur diharapkan akan menambah informasi tentang wewenang dan tugas Kurator, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi aparat penegak hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*⁵

⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal. 11

Pengertian pailit yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dihubungkan dengan ketiadamampuan untuk membayar dari Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas "*publitas*"⁶

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitur agar dicapainya perdamaian antara Debitur dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.⁷

2. Obyek Kepailitan

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan (UUK) menyebutkan bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan".

Jadi objek kepailitan adalah aset/harta Debitur pada saat kepailitan diucapkan dan harta/aset yang diperoleh Debitur selama kepailitan.

Harta/aset tersebut dapat berupa:

⁶ *Ibid*, hal. 11-12

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 8.

a. benda tetap (tak bergerak):

a.1. yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar dan lain-lain;

a.2. yang tak bertubuh, misalnya: hipotik dan lain-lain.

b. benda bergerak:

b.1. yang bertubuh, misalnya: mebel, mesin-mesin, mobil, barang dagangan dan lain-lain;

b.2. yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai dan lain.

Namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UUK, bahwa barang-barang dan hak-hak yang walaupun barang-barang dan hak-hak itu termasuk kekayaan Debitur atau diperoleh selama kepailitan, tidak termasuk dalam kepailitan, seperti:

- Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
- Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penghasilan dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah,

pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

- Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

3. Syarat Pernyataan Pailit

Debitur yang dimohonkan kepailitan harus memiliki persyaratan. Pasal *Faillissement verordening* (Fv.) sebelum dirubah menyebutkan syarat, bahwa debitur “dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, sedangkan dalam Pasal 2 UUK mensyaratkan “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih”.

Persyaratan antara Fv dan UUK agak berbeda satu dengan lain. Pada UUK ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yakni :

- (1) Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- (2) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktunya;
- (3) Utangnya dapat ditagih.

Jadi keadaan Debitur adalah dalam keadaan insolvensi yaitu tak mampu lagi membayar utangnya; dan “utang tersebut telah jatuh

waktunya”, berarti hal ini menyangkut soal *ingebreke stelling* (penagihan).

“Penagihan” disini diartikan suatu pemberitahuan oleh pihak Kreditor bahwa pihak Kreditor ingin supaya Debitur melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Faktor “waktu” adalah penting dalam hal perjanjian, terutama dikalangan bisnis. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak ada keinginan supaya secepat mungkin tujuan dari perjanjian terlaksana, yaitu pihak Kreditor supaya lekas merasakan kenikmatan yang terletak pada pelaksanaan janji, sedang pihak Debitur supaya lekas terlepas dari suatu ikatan, yang dampaknya akan sedikit menekan jiwanya.⁸

Keharusan adanya sedikitnya dua Kreditor adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan Debitur antara para Kreditornya harus dilakukan secara *pari passu pro rata parte*. Jika hanya ada satu Kreditor, walaupun banyak tagihannya, bukan jalan proses kepailitan terhadap Debitur yang harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa sitaan serta eksekusi biasa yang spesifik terhadap Debitur. Jadi

⁸ *Ibid.*, hal. 16 – 17.

yang dititikberatkan dalam kepailitan bukan berapa banyak piutang/tagihan yang dipunyai satu Kreditor terhadap satu Debitur, tetapi berapa banyak jumlah Kreditor dari Debitur yang bersangkutan.⁹

4. Tata Cara Permohonan Pailit

Berdasarkan Pasal 6 UUK No.37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Adapun subjek pemohon adalah: Kreditor, Debitur, Jaksa, Bank Indonesia, Bapepam maupun Departemen Keuangan. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftarkan. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:

- Debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;

⁹ Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Nomor: 4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan – UU Kepailitan/Perpu No. 1 Th. 1998 – Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999, hal. 3.

- Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. Selama sidang hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian/seluruhnya atas kekayaan Debitur, dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Debitur maupun mengawasi pembayaran kepada Kreditor. Yang terakhir adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya

istilah *'the rule of law'* versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁰

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

manusia, melanggar ketentuan Undang – Undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana. KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹¹

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan pidana dilakukan maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹²

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹³

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

¹¹ Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita: Jakarta. hal. 50

¹² *Ibid*, Chazawi, Adami.

¹³ Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. hal. 11

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/ kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 □ KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

6. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tentang tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu

sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan.

Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu : Istilah pengertian secara Gramatikal, Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua thn 1989 halaman 837 di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati.

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima

laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.¹⁴

7. Kurator

Pengertian Kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurus dan pengawasan atas harta benda orang lain.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 5).

Tanggung jawab Kurator diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

a. Tugas Dan Kewenangan Kurator

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.¹⁶

¹⁴ <https://daidonatus.wordpress.com/2014/01/28/pengertian-penyelidik-dan-penyidik/>, diakses 10 Mei 2017, Pukul 20.23.

¹⁵ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998, hal. 479

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 64.

Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitur dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau Kreditor.¹⁷

Tugas Kurator secara rinci antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) UUK);
- (2) Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK);
- (3) Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 UUK), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 UUK).

¹⁷ Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hal. 44.

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 UUK);

- (4) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 UUK);
- (5) Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 UUK);
- (6) Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 UUK);
- (7) Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 UUK);
- (8) Memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 UUK);
- (9) Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) UUK);
- (10) Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK);
- (11) Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK) dan menempatkan

daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 UUK);

- (12) Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK);
- (13) Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) UUK);
- (14) Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) UUK). Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK).

Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitur (Pasal 36 ayat (1) UUK).
- (2) Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitur (Pasal 38 UUK), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) UUK).

(3) Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK).

(4) Menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) UUK).

(5) Melanjutkan usaha Debitur.

Dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) UUK).³) Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitur (Pasal 105 UUK).

(6) Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK).

(7) Mengalihkan harta pailit.

Dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, curator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UUK).

- (8) Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Pasal 109 UUK).
- (9) Meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor (Pasal 116 ayat (2) UUK).
- (10) Berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang Kreditor (Pasal 124 ayat (3) UUK).
- (11) Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK).

8. Harta Boedel Pailit

Harta boedel pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan.¹⁸

Menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1).

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, II, III dan IV KUH Perdata dan pada Buku I KUH Dagang. Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.¹⁹

Kepailitan semula diatur oleh Undang-Undang tentang Kepailitan yang dikenal dengan sebutan *Failissement Verordening* (FV) yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348 FV tersebut kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa Negara Indonesia sejak

¹⁸<https://www.kamusbesar.com/budel-pailit>

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, Loc.Cit

pertengahan tahun 1997. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya²⁰. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*

²⁰Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4

approach). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-sosiologis.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan kewenangan kurator terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.²¹ Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap pihak yang menangani tentang kewenangan kurator terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Bahan peraturan perundangan.

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. KUHPerdara.

c. KUHPidana.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

g. Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem kewenangan kurator terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa

Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang penegakan hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit. Disamping itu menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap kurator yang menyalahgunakan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.